

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Sudaryono, Natangsa Subakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Ali, Mahrus. 2020. *Viktimologi*. Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 29-30.

Ngurah Pawarta, I Gusti. 2017. Buku Ajar Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan. Denpasar. Universitas Udayana.

Gomgom T.P Siregar, Dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana (Medan : Cv. Manhaji Medan : 2020),

Jonadi Efendi, Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, Pranamedia Group.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press

Faozi, Safik. (2012). Mengenal Viktimologi. Semarang : Universitas Stikubank Semarang

### JURNAL

Sutinah, S., & Kinuthia, K. M. (2019). Trafficking Of Women And Children In East Java, Indonesia. *Journal Of International Women's Studies*, 20(9), 94-106.

Susianawati, A. T., & Faozi, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 23(2), 152-165.

Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).

HAMSAR, H. (2021). *KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).

Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 107–120.

Robiyansah, M. (2023). *Tindak Pidana Pwenggelapan Dalam Jabatan Oknum Karyawan Pada Commanditaire Vennotschap Performa Mandiri R2 Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Harmuzan, M., & Muhlizar, M. (2022). Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif. *Neraca Keadilan*, 1(2), 37–46.

Widiyantoro, Bambang. (2019). *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime An Abuse Power Terhadap Perlindungan Korban*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, 4 (1), 2-12.

- Wati, Nendra.(2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Barat. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 2.
- Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, D. A., Mulyadi, M., Harefa, B. H., & Satino, S. (2022). Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 847–856.
- Miekhel, J. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) Di Indonesia. *Science And Research Journal Of Mai Wandeu*, 1(2), 132–150.
- Ilham Nanda, Rizanizarli. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 138-149.
- Triana Putri, Respati; Ferdin Bakker, Felix ; Chairunnisa, Dhea , (2022). Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukuminternasional. *Jurnal Of Law And Border Protection*, 4 (1), 79-88
- Setiawan, D. (2021). Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur 5 Tahun. *Legal Spirit*, 4(2).
- Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2).
- Fadilah, N. (2023). Implementasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Main Hakim Sendiri (Eigenrichting). *The Victim: Journal Of Victimology*, 1(1), 87-100

## **REGULASI**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak Merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **LAMAN INTERNET**

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada 20 Desember 2022.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210679/tipu-muslihat-yang-menjerat-mahasiswi-cianjur-nyaris-jadi-psk>, diakses pada 17 Maret 2023

<https://www.dewimagazine.com/news-art/bias-makna-perempuan-di-hari-perempuan>, diakses pada 20 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 26 Maret 2023

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 31 Maret 2023

<https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada 23 Maret 2023

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse> diakses pada 21 Mei 2023.